

ABSTRAK

Penulisan tesis ini membahas persoalan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Dengan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan? 2) Bagaimana Cara Menentukan Kesalahan Pelaku Atas Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum terser. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisai, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan telah diatur dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan ancaman pidana yang berbeda, akibatnya terjadi ketidakadilan bagi pelaku terpidana orang (*natural person*) tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. 2) Cara Menentukan Kesalahan Pelaku Atas Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan: 1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti sipelaku dalam keadaan sehat dan normal; dan adanya hubungan antara perbuatan pelaku tindak pidana (*Actus Reus*) dengan sikap batinya berupa “dengan sengaja atau karena lalai.” Rekomendasi diberikan kepada: 1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merevisi pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan mensinkronkan perumusan sanksi pidana dalam Pasal 187 KUHP dan Pasal 188 KUHP, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2) Hakim pengadilan dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi agar membuat amar putusan “dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka sebagian harta/aset terdakwa disita dan selanjutnya dilakukan pelelangan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan Dan Lahan*

***THE CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF PERPETRATORS OF FOREST
AND LAND BURNING IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATIVE
REGULATIONS***

ABSTRACT

The writing of this thesis discusses the issue of Criminal Accountability of Forest and Land Burning Perpetrators in the Perspective of Legislative Regulations. With the problems discussed are: 1) How are the criminal accountability arrangements for forest and land burning perpetrators in the statutory regulations? 2) How to determine the culprit's fault for forest and land fires in the perspective of statutory regulations? With the formulation of these problems, the research method used is normative juridical research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by means of inventorying, systematizing and interpreting. The results of the study show that: 1) Regulation of Criminal Accountability of Forest and Land Burning Actors in the Legislative Regulations has been regulated in Article 187 of the Criminal Code and Article 188 of the Criminal Code, Article 78 of Act Number 41 of 1999 concerning Forestry in conjunction with Act Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Article 108 of Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Article 108 of Act Number 39 of 2014 concerning Plantations, with different criminal threats, as a result there is injustice for the convicted person. (natural person) the criminal act of burning forest and land. 2) How to determine the culprit's fault for the occurrence of forest and land fires in the perspective of the Prevailing Laws: 1) the ability to be responsible to the perpetrator in the sense that the perpetrator is in a healthy and normal condition; and there is a relationship between the act of the perpetrator of the criminal act (*Actus Reus*) and his inner attitude of "intentionally or negligently." Recommendations are given to: 1) The Government and the People's Representative Council of the Republic of Indonesia to revise criminal sanctions arrangements in the crime of forest and land burning by synchronizing the formulation of criminal sanctions in Article 187 of the Criminal Code and Article 188 of the Criminal Code, Article 78 of Act Number 41 of 1999 concerning Forestry Jo Act Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Article 108 of Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Article 108 of Act Number 39 of 2014 concerning Plantations. 2) The court judge in imposing a fine sentence against the corporation to make a verdict "provided that if the fine is not paid within 1 (one) month after the verdict is legally binding, part of the defendant's assets/assets are confiscated and then an auction is carried out.

Keywords: Criminal Accountability, Perpetrators, Forest and Land Burning